

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE FOR HEALTH AND EDUCATION ON HUMAN DEVELOPMENT INDEKS IN NORTH SULAWESI PROVINCE

Alison Jeackline Lawrence Heka¹, Agnes Lapian², Imelda Lajuck³

¹²³*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: poppyheka120694@gmail.com*

ABSTRAK

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat setiap tahun. Dengan perkembangan era modern saat ini pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia antara lain lewat Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (tahun 2006-2015). Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Statistik Inferensia (Analisis Regresi Berganda) dengan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Namun, secara simultan tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

North Sulawesi Province is one of the province that the Human Development Index keep increasing every year. With the development current of modern era. Government have an important role to improving Human Development Index, among others Government Expenditure for Health and Education. This research aims to knowing the effect of Government Expenditure for Health and Education to Human Development Index in North Sulawesi Province (period 2006-2015). The analysis technique used is Descriptive Analysis and Inferential Statistical Analysis (Multiple Regression Analysis) with secondary data. The result of analysis show that Government Expenditures for Health and Government Expenditure for Education have a significant influence on the Human Development Index in North Sulawesi Province. But simultaneously has no effect.

Keywords: Government Expenditures for Health, Government Expenditures for Education, Human Development Index

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada. Pemerintah dan swasta membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya. Paradigma yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparigitas geografi serta kondisi sosial masyarakat beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibuat dan dipopulerkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul "*Human Development Report*" Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional perkapita. UNDP mendefinisikan IPM sebagai "*a process of enlarging people's choice*" atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih rendah sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia yang menempati urutan ke 121 dari 187 Negara dan berada di posisi ke 6 dari 10 negara ASEAN (Achmad Sjafii, 2009). Pada tahun 2010-2012, IPM di Sulawesi Utara peningkatan pada masing-masing tahun tidak dapat menembus angka 0,6%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,54%, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,59% dan pada tahun 2012 kembali ke angka 0,54%.

Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka fiskal yang dimaksudkan adalah pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan. Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dal hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Dalam ilmu ekonomi sektor pendidikan dan kesehatan telah diyakini memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan tingkat pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital atau yang dikenal sebagai input fungsi produksi agregat. Peran

gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah juga mempunyai peran dari Indeks Pembangunan Manusia yaitu dengan meningkatkan anggaran kesehatan dan pendidikan yang dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang diharapkan memberikan rekomendasi untuk Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan kualitas hidup seperti pembangunan sekolah, infrastruktur dan lain-lain. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimanakah pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Bagaimanakah pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara?

Tinjauan Pustaka

Teori Wagner

Eka Agustina (2014) menyatakan teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap *Gross National Product*. Menurutnyanya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

Teori Peacock dan Wiseman

Maria Bau (2011) mengatakan Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Maria Bau, 2011).

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Menurut Michael P. Todaro (2000) ada dua biaya pendidikan, yaitu; biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya moneter atau

uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PPU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Indeks Pembangunan Manusia

Risha Amalia (2016) menyatakan dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“*a process of enlarging people’s choices*”). Konsep atau definisi pembangunan tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Asri (2011) menyatakan melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Todaro dan Smith (2003) menyatakan Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Wahid (2012) mengatakan Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Pengeluaran pembangunan dalam sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplan (penjelasan pengaruh) yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas (independen variabel) dengan variabel terikat (*dependent variabel*).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian pada Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan mulai Februari-Juni 2017.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini 10 tahun/periode data Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.

Metode Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *SPSS 21*. Untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan independen, maka pengelolaan data dilakukan dengan metode analisis dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS digunakan untuk memperoleh estimasi parameter dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode OLS dipilih karena merupakan salah satu metode sederhana dengan analisis regresi yang kuat dan populer, dengan asumsi-asumsi tertentu (Gujarati, 2003). Ada persamaan regresi yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad ; \text{dimana :}$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Terikat)

β_0 = Konstanta

β_1 dan β_2 = Koefisien Regresi

X₁ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (Variabel Bebas 1)

X₂ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (Variabel Bebas 2)

e = Parameter Pengganggu

Dalam penelitian ini meliputi pengujian serempak (uji-f), pengujian individu (uji-t) dan pengujian ketepatan perkiraan (R^2) dan uji asumsi klasik yang meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi dan juga dilakukan pengujian Asumsi Klasik yaitu meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorekasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Dari output dibawah didapat $X_{1.1} = 0,827$ $X_{1.2} = 0,648$. Karena nilai seluruh indikator $> 0,05$, berarti indikator dinyatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

		Correlations		
		Indeks Pembangunan Manusia	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
Pearson Correlation	Indeks Pembangunan Manusia	1,000	,827	,648
	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	,827	1,000	,710
	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	,648	,710	1,000
Sig. (1-tailed)	Indeks Pembangunan Manusia	.	,002	,021
	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	,002	.	,011
	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	,021	,011	.
N	Indeks Pembangunan Manusia	10	10	10
	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	10	10	10
	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	10	10	10

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Autokorelasi

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai durbinwatson dibandingkan dengan tabel durbin watson (d_l dan d_u). Jika $(4-d) > dU$ maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Nilai d_l dan d_u untuk rasio 10 tahun sebanyak 10 yaitu dU 1.6413 dan dL 0.6972, berikut adalah hasil output autokorelasi.

Tabel 2. Tabel Output Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.832 ^a	.692	.604	.83711	.981

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Dari hasil tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa nilai autokorelasi di antara $(4-0.981) > 1,6413$ tidak terdapat autokorelasi negatif.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Tabel Uji Multikolonieritas

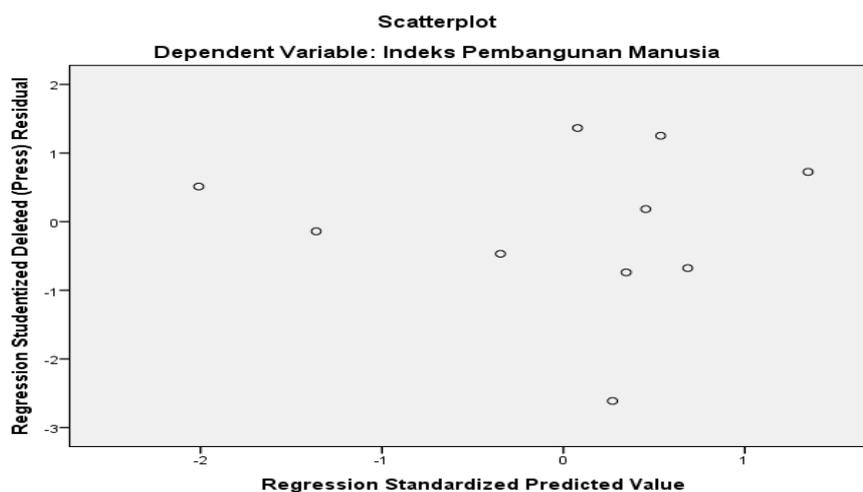
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	0,496	2,015
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	0,496	2,015

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Dengan melihat tabel 3 diatas nilai VIF dari variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (2,015) dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (2,015), maka disimpulkan tidak terjadi multikolienaris.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas yaitu: Hasil output tidak terjadi heterokedastisitas dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 1. Scatterplot Uji etorokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Melihat pola *scatterplot* maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik tidak menyebar diatas dan dibawah disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar dan menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Analisis Regresi Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda dilakukan dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen dengan persamaan regresi linier sederhana yaitu $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$, berikut adalah hasil Analisis Regresi Berganda:

Tabel 4. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	-21.656	30.066		-.729
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	7.353	2.969	.740	5.537
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	1.527	3.699	.123	2.522

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil output diatas diperoleh persamaan regresi linier sederhana adalah $\hat{Y} = -21,656 + 7,353PPBK + 1,527PPBP$. Dari persamaan yang terbentuk dapat dijelaskan interpretasinya sebagai berikut:

- Nilai konstanta -21,656 mengandung arti Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan walaupun belum ada maka Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar -21,656 %.
- Jika Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan meningkat sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan sebesar 7,353%.
- Jika Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan meningkat sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan sebesar 1,527 %.

Hasil Uji t

Hasil Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) dapat dilihat pada hasil output tabel 4. Ketentuannya adalah jika nilai signifikan ≤ 0.05 maka H_0 diterima, jika nilai signifikan ≤ 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

- t hitung untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan = 2,485 sedangkan t tabel memiliki nilai sebesar 2,306. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung (2,485) > t tabel (2,306). Dengan demikian, maka variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- t hitung untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan = 0,413 sedangkan t tabel memiliki nilai sebesar 2,306. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t hitung (0,413) <

t tabel (2,306). Dengan demikian, maka Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Uji Hipotesis

Hasil Uji F

Uji F (Simultan) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung \geq F tabel, maka dikatakan pengaruhnya signifikan dan apabila F hitung \leq F tabel maka pengaruhnya tidak signifikan. Berikut adalah hasil output untuk melihat nilai F hitung:

Berdasarkan hasil output pada tabel 5 nilai F hitung adalah 7,860. Nilai F tabel untuk 2 variabel bebas dan n+8 adalah 4,46. Nilai F hitung (7,860) > Nilai F tabel (4,46) maka secara serempak atau simultan X1 dan X2 berdampak pada Y. Nilai Sig (0,016) < (0,05), maka secara serempak X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Tabel 6. Hasil Output Uji Hipotesis

ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.016	2	5.508	7.860	.016 ^a
	Residual	4.905	7	.701		
	Total	15.921	9			

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Hasil Uji Koefesien Korelasi (R)

Tabel 7. Hasil Uji Koefesien Korelasi (R)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.832 ^a	.692	.6004	.83711	.981

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Pada tabel 7 ringkasan model dapat dilihat besarnya koefesien korelasi berganda (r) dari model hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel terikat adalah sebesar 83,2 %. Hal ini berarti bahwa antara variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan yang kuat.

Hasil Uji Koefesien Determinasi (R²)

Kontribusi atau determinasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat dalam uji determinan (R Square atau R²). Hasil yang tercantum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa nila R Square adalah sebesar 0,692 atau 69,2%. Hal ini berarti bahwa pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara adalah 69,2% sedangkan sisanya sebesar 30,8 % disumbangkan oleh variabel lain yang tidak di kaji dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dibahas beberapa hal penting yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia adalah positif. Hal ini sama dengan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia adalah positif dalam kaitannya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pusat yaitu lebih khusus tentang Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Hasil penelitian mengenai uji t (parsial) untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Uji F (simultan) juga menunjukkan secara serempak kedua variabel berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini juga sejalan dengan Teori Wagner.

Kurang sesuaiinya hasil penelitian ini dengan landasan teori bukan berarti bahwa penelitian ini tidak mengikuti kaidah metodologi penelitian dan statistika ekonometrika yang benar. Pemilihan variabel penelitian sudah sesuai dengan dasar teori keuangan daerah. Semangat otonomi daerah memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada seluruh *stakeholder* di daerah untuk menggali semua potensi dan sumber daya yang ada di daerah untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli. Namun ketergantungan terhadap dana perimbangan seperti Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan sangatlah tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pengetahuan Manusia dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan tidak memiliki pengaruh. Tetapi secara simultan atau serempak Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini mengandung arti bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan yang diberikan selama ini oleh pemerintah terhadap masyarakat kecil yang cenderung kurang mampu belum bisa meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kaitannya tentang Indeks Pembangunan Manusia seharusnya Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan diharapkan ditingkatkan dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Agar lebih kena sasarannya untuk kehidupan mendatang setiap masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu juga untuk meningkatkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara karena peningkatan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan akan memberi

- kontribusi positif meskipun kecil terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah juga diwajibkan untuk memperhatikan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan sehingga benar tepat sasaran.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar perlu penambahan variabel makro ekonomi yang lain agar model estimasi dapat lebih dipercaya dan mampu menjelaskan Indeks Pembangunan Sulawesi Utara. Dan melakukan penelitian lagi selain di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam jurnal

- [1] A.M. Zubir. (2016). Artikel wordpress tentang Pengertian Belanja Bantuan Sosial dan resiko Sosial.
- [2] Achmad Sjafii. (2009). Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. Jurnal.
- [3] Antony Davies. (2009). *Human Development and the Optimal Size of Government*. Jurnal.
- [4] Astri, Meylins. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal.
- [5] Astri Winarti. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kemiskinan, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012. Skripsi.
- [6] Bharatee Bhushan Dash dan Sacchidananda Mukherjee. (2013). *Does political competition influence human development? Evidence from the Indian state*.Jurnal.
- [7] Cliff Laisyana. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara 2002-2013.Skripsi.
- [8] Denni Sulistio Mirza. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Jurnal.
- [9] Eka Agustina, Eny Rochaida, dan Yana Ulfah. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. Skripsi.
- [10] Gusi Bagus Kompiang. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. Jurnal.
- [11] I Made Pradana Adiputra, Ni Kadek Desi Dwiyantari dan Dewa Kadek Darmada. (2011). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Bali). Jurnal
- [12] Maria Yunitha Bau. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY Tahun 2005-2009. Jurnal.
- [13] Mohammad Javad Razmi. (2012). *Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran*. Jurnal.
- [14] Nurkhikmah Amalia Hasan. (2015). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal.
- [15] Ogunrinola, I. Oluranti. (2011). *Government Expenditure on Human Capital Development Implications for Economic Growth in Nigeria*. Jurnal.

- [16] Omankhanlen Alex Ehimare, Barr. Emmanuel Imuetnyan Obarisiagbon, Joshua O. Ogaga-Oghene, Uchechukwu Emena Okorie. (2014). *The Nigerian Government Expenditure On Human Capital Development: An Efficiency Analysis*. Jurnal.
- [17] Pemilu Sarumaha. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi.
- [18] Putu Gde Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal.
- [19] Richardson Kajo Edeme. (2014). *Analyzing the Effects of Sectoral Public Spending On Human Development in Nigeria: Evidence from Panel*. Jurnal.
- [20] Risha Amalia. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal.
- [21] Riva Ubar Harahap. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal
- [22] Winarti A. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012. Jurnal.

Buku

- [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53
- [2] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05.2012. Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga BAB I Ketentuan Umum Pasal 1
- [3] Teknis Standard Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, BAB III Ketentuan Bantuan Sosial. 2009.
- [4] Todaro M.P. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan.
- [5] Todaro M.P dan Smith, S.C. (2003). *Economic Development, Eight Edition*. PT. Gelora Angkasa Pratama